

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAHAN DAERAH DI PULAU TIMOR PERIODE 2013-2018

Made Denny Oktariyana^{1*} Christian Timotius Peilouw²
^{1,2} Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang
*E-mail: dennyoktariyana@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of Regional Original Income and Capital Expenditures on the Human Development Index in Regional Governments on the mainland of Timor Island. The Human Development Index shows the success rate of development in a region. This research covers 5 districts and 1 city on the island of Timor. The data collected is secondary data in the form of Human Development Index figures obtained from the official website of the Central Bureau of Statistics and Budget Realization Reports for District/City Governments on the mainland of Timor Island obtained from the Regional Finance Board of East Nusa Tenggara Province for the 2013-2018 period. The sample in this study amounted to 35 with the technique of paying using the saturated sample method. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of the SPSS program. The results of this study indicate that Regional Original Income has a positive and significant effect on the Human Development Index, while Capital Expenditure has no effect on the Human Development Index.

Keywords: Capital Expenditure, Human Development Index, Local Revenue

PENDAHULUAN

Manusia adalah kekayaan bangsa sesungguhnya sehingga sasaran utama pembangunan menjadikan manusia sebagai fokus utamanya. United Nations Development Program (UNDP) menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk melalui upaya pemberdayaan penduduk. Upaya pemberdayaan penduduk dapat dicapai dengan program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan angka harapan hidup saat lahir (indeks kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (indeks pendidikan), serta pengeluaran per kapita (indeks pengeluaran).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai angka 64,39. Angka ini naik 0,66 poin dari tahun 2017 sebesar 63,73. Selama periode 2013-2018, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kelompok "sedang" dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 0,86% per tahun. Selama periode 2017-2018, tingkat pertumbuhan Indeks

Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,04% per tahun.



Gambar 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018

Badan Pusat Statistik juga menerbitkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari setiap kabupaten/kota yang ada dalam setiap provinsi di Indonesia tiap tahunnya.

Tujuannya adalah untuk melihat sejauhmana keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Dari data Badan Pusat Statistik, pencapaian pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup bervariasi. Pada tahun 2018, capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat kabupaten/kota berkisar antara 55,79 (Kabupaten Sabu Raijua) hingga 78,84 (Kota Kupang). Perbedaan angka antara Indeks Pembangunan Manusia tertinggi

dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah sebesar 23,05. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan pencapaian pembangunan antardaerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih tinggi. Hal ini berarti kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduk di tiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong rendah. Rincian lebih lanjut akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun						Status IPM 2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Sumba Barat	60,55	60,9	61,36	61,85	62,3	62,91	Sedang
2	Sumba Timur	61,44	62,04	62,54	63,22	64,19	64,65	Sedang
3	Kupang	61,07	61,68	62,04	62,39	62,79	63,55	Sedang
4	Timor Tengah Selatan	58,76	59,41	59,9	60,37	61,08	61,58	Sedang
5	Timor Tengah Utara	59,56	60,41	60,96	61,54	62,03	62,65	Sedang
6	Belu	59,12	59,72	60,54	61,04	61,44	61,86	Sedang
7	Alor	57,52	58	58,5	58,99	59,61	60,14	Sedang
8	Lembata	60,56	61,45	62,16	62,81	63,09	63,96	Sedang
9	Flores Timur	59,8	60,42	61,24	61,9	62,89	63,55	Sedang
10	Sikka	60,84	61,36	61,81	62,42	63,08	63,89	Sedang
11	Ende	64,64	65,25	65,54	65,74	66,11	66,62	Sedang
12	Ngada	64,43	64,64	65,1	65,61	66,47	67,1	Sedang
13	Manggarai	59,49	60,08	60,87	61,67	62,24	63,32	Sedang
14	Rote Ndao	57,28	57,82	58,32	59,28	60,51	61,51	Sedang
15	Manggarai Barat	59,02	59,64	60,04	60,63	61,65	62,58	Sedang
16	Sumba Tengah	57,25	57,6	57,91	58,52	59,39	60,07	Sedang
17	Sumba Barat Daya	59,26	59,9	60,53	61,31	61,46	61,89	Sedang
18	Nagekeo	62,24	62,71	63,33	63,93	64,74	65,35	Sedang
19	Manggarai Timur	55,74	56,58	56,83	57,5	58,51	59,49	Rendah
20	Sabu Raijua	51,55	52,51	53,28	54,16	55,22	55,79	Rendah
21	Malaka	56,14	56,94	57,51	58,29	58,9	59,66	Rendah
22	Kota Kupang	77,24	77,58	77,95	78,14	78,25	78,84	Tinggi

Dari tabel diatas jelas terlihat jumlah kabupaten/kota dengan kelompok pembangunan manusia “tinggi” hanya 1, yaitu Kota Kupang di angka 78,84. Sementara itu, yang termasuk dalam kelompok pembangunan manusia “rendah” terdapat 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Malaka yang masing-masing berada pada angka 55,79, 59,49, dan 59,66. Sedangkan, sisanya masuk dalam kelompok pembangunan manusia “sedang”. Selama periode 2017-2018, kabupaten/kota dengan tingkat pertumbuhan pembangunan manusia paling cepat ada pada Kabupaten Manggarai (1,74%), Kabupaten Manggarai Timur (1,67%), dan Kabupaten Rote Ndao (1,65%). Hal yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Belu dikarenakan memiliki

pertumbuhan yang paling lambat (0,68%).

Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesenjangan antardaerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang ini pemerintah daerah diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Efektivitas pencapaian keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada

dukungan pemerintah dalam konteks penganggaran. Kemampuan keuangan daerah dicerminkan melalui formula anggaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). López et al. (2010) Peran pemerintah dalam mengelola pendapatan suatu daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan yang besar. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) yang mengatakan bahwa antara agen dan principalnya tidak selalu memiliki kepentingan yang sama seperti adanya benturan kepentingan masyarakat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agen*) tentunya dapat menyebabkan belanja daerah maksimal dirasakan manfaatnya (Soejoto et al., 2015).

Teori *fiscal federalism* menjelaskan faktor penting dari desentralisasi fiskal adalah pemerintah Kabupaten/Kota diberi otonomi untuk menentukan alokasi realisasi mereka. Alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota termasuk dalam desentralisasi fiskal (Pradana, 2018). Tingkat Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, semakin besar atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah di suatu wilayah maka dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa daerah memiliki sumber dana yang cukup dan mampu untuk membiayai belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021), Pradnyantari & Dwirandra (2017) dan Sari & Supadmi (2016), yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian, dari penjelasan ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengadaan aset daerah sebagai penambah aset yang mana akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena ada peningkatan sarana dan prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik (Pradnyantri dan Dwirandra, 2017). Peningkatan sarana dan prasarana publik, serta investasi pemerintah yang meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya akan meningkatkan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan (Bati, 2009). Semakin besar atau kecil

anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka akan berdampak pada tinggi atau rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021), Sari dan Supadmi (2016), Yanto & Fattah (2018), yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian, dari penjelasan ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, kesenjangan antardaerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi masalah yang harus dituntaskan agar setiap daerahnya tidak semakin tertinggal. Pemerintah Daerah di daratan Pulau Timor menjadi fokus utama karena pada Pemerintah Daerah di Daratan Pulau Timor terdapat daerah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia ketiga terendah (Kabupaten Malaka), capaian Indeks Pembangunan Manusia tertinggi (Kota Kupang), dan tingkat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang paling lambat (Kabupaten Belu). Perbedaan tingkat Indeks Pembangunan Manusia ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah belum memanfaatkan sumber penerimaan milik daerah dan alokasi anggaran belanja modal secara optimal untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian terkait Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di daratan Pulau Timor perlu dikaji kembali. Meskipun penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan, namun hasil penelitiannya menunjukkan ketidakkonsistenan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah di daratan Pulau Timor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Laporan Realisasi Anggaran dan angka Indeks Pembangunan Manusia dari kabupaten/kota di daratan Pulau Timor dengan rentang waktu selama enam tahun (Tahun 2013-2018), sehingga total populasi dalam penelitian ini sebanyak 36. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh data Laporan Realisasi Anggaran dan angka Indeks Pembangunan Manusia 5 Kabupaten dan 1 Kota di daratan Pulau Timor, meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang dengan rentang waktu enam tahun (tahun 2013-2018). Jadi, total sampel dalam penelitian ini sebanyak 35. Perhitungan total sampel diperoleh dari 6 Kabupaten/Kota x 6 tahun pengamatan = 36 – 1 tahun = 35 pengamatan. Pengurangan 1 tahun dilakukan pada Kabupaten Malaka di tahun 2013 karena Kabupaten Malaka baru terbentuk pada tahun 2013 sehingga tidak memiliki Laporan Realisasi Anggaran.

Pengumpulan data dapat diperoleh dari sumber data yang digunakan dengan cara melakukan pencatatan informasi yang terjadi terhadap data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran pada Pemerintahan Daerah di dataran Pulau Timor yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dan indeks pembangunan manusia tahun 2013-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur serta hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan buku-buku literatur untuk menghasilkan argumentasi yang mendukung hasil analisis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Persamaan regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai rata-rata Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia (mean), simpangan baku (Std. Deviation), dan jumlah data (N). Berikut hasil analisis statistik deksriptif:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation	N
IPM	63.5654	6.82320	35
PAD	67,115,608,580	44,718,182,354	35
BM	167,626,955,374	72,372,562,507	35

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diketahui bahwa dengan jumlah data 35, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di daratan Pulau Timor sebesar 63,57 dan simpangan baku sebesar 6,82. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di daratan Pulau Timor sebesar Rp 67.115.608.580, dengan simpangan baku sebesar 44.718.182.354. Sedangkan, nilai rata-rata Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di daratan Pulau Timor sebesar Rp 167.626.955.374 dengan simpangan baku sebesar 72.372.562.507.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		35
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.22595043
Most Extreme	Absolute	.210
Differences	Positive	.111
	Negative	-.210
Kolmogorov-Smirnov Z		1.244
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 3 diperoleh nilai Test Statistic Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,244 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,091 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	,958	1,044
	BM	,715	1,398

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat dijelaskan bahwa nilai Tolerance masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menyebabkan model regresi tidak efisien atau tidak akurat. Jika nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	N	Sig. (2-Tailed)
PAD	35	0,132
BM	35	0,198

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode uji Rank Spearman (Spearman's Rho) diatas menunjukkan nilai signifikansi tiap variabel independen yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu sebelumnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi masalah autokorelasi, karena jika ada maka persamaan tersebut tidak layak digunakan. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi	
Durbin-Watson	Kriteria
1,947	-2 < 0,623 < 2

Hasil pengujian autokorelasi dengan metode uji Durbin-Watson diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,623. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, nilai 0,623 berada di antara -2 sampai 2 yang artinya dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

UJI HIPOTESIS

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal (variabel independen) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (variabel bebas). Adapun hasil dari analisis regresi linear berganda ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-3.682	1.382		-2.664	.012
	PAD	.300	.066	.700	4.580	.000
	BM	.014	.013	.159	1.041	.306

a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan hasil olah data, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -3.682 + 0,300X_1 - 0,014X_2$$

Persamaan di atas kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

Angka konstanta (a) sebesar 56,749 memiliki arti bahwa jika nilai X_1 (Pendapatan Asli Daerah) dan X_2 (Belanja Modal) tidak ada (sama dengan 0), maka pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia nilainya sebesar -3.682.

Koefisien regresi variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah) bernilai positif yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia yaitu sebesar 0,145. Hal ini berarti setiap penambahan 1 (satu) Pendapatan Asli Daerah meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,300 dengan asumsi variabel independen lainnya

bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel X_2 (Belanja Modal) bernilai negatif yang menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia yakni sebesar 0,014. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1 (satu) Belanja Modal, maka akan terjadi penurunan angka Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,017 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variabel independen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,827 ^a	,664	,23290

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,664 atau 66,4 persen yang berarti bahwa 66,4 persen variasi dari Indeks Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh variable Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sedangkan sisanya 33,6%.

Uji Statistik F (Uji Simultan)

Tabel 9. Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.756	2	1.878	34.626	.000 ^b
Residual	1.736	32	.054		
Total	5.492	34			

- a. Dependent Variable: IPM
- b. Predictors: (Constant), PAD, BM

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 9 diperoleh nilai F sebesar 6,256 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Uji Statistik t

Uji statistik t untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial atau individu dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level; 0,05 (α=5%). Hasil pengujian uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.682	1.382		-2.664	.012
	PAD	.300	.066	.700	4.580	.000
	BM	.014	.013	.159	1.041	.306

a. Dependent Variable: IPM

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Berdasarkan pada Tabel 10 dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Nilai koefisien regresi variable Pendapatan Asli Daerah (X₁) adalah positif 0,300 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (X₁) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hipotesis 1 diterima

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di suatu daerah dapat dilihat dari seberapa sanggup Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan mutu pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek yang menunjang adalah pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah harus bisa memanfaatkan sumber pendapatan daerah secara maksimal, paling utama melalui Pendapatan Asli Daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan kemampuan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemberian otonomi daerah.

Semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah di suatu wilayah akan berimplikasi pada semakin tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah sanggup menggunakan sumber dana yang dipunyai secara optimal sehingga memungkinkan untuk membiayai sektor-sektor yang menunjang Indeks Pembangunan Manusia. Usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini melalui Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika sepanjang rentang waktu 2013-2018 ini Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah di daratan Pulau Timor sanggup meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi Yanto, dkk (2018) yang mengatakan Pendapatan Asli Daerah akan memberi dampak pada pembangunan di daerah dalam wujud pengadaan sarana dan infrastruktur yang ditujukan demi kepentingan publik. Dalam pandangan Sari dan Supadmi (2016), peningkatan Pendapatan Asli Daerah

akan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia lewat pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk keperluan publik. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Pradnyantari dan Dwirandra (2017) yang mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Ketika Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah mengalami peningkatan, maka kesejahteraan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia akan turut mengalami peningkatan.

Sementara itu, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhly (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia adalah negatif yang berarti setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Nilai koefisien regresi variable Belanja Modal (X_2) adalah positif 0,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,306 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Belanja Modal (X_2) berpengaruh tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hipotesis 2 ditolak.

Belanja modal ialah pengeluaran yang digunakan untuk menambah aset tetap atau aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dialokasikan untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang terdapat di daerahnya. Belanja modal apabila dialokasikan sesuai kebutuhan dasar daerah, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal terdiri atas belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.

Semakin besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka akan berdampak pada peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai. Pendidikan dan kesehatan menjadi tujuan pembangunan yang mendasar. Apabila pemerintah daerah sudah memenuhi fasilitas

dasar untuk hal ini maka daerah akan sanggup meresap teknologi modern dan mampu mengembangkan diri agar terbentuk pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan bertumpu pada kesehatan yang baik, dan produktivitas seseorang meningkat apabila kesehatan terpenuhi. Apabila kedua hal ini sudah terpenuhi, maka akan mampu untuk mengembangkan lapangan pekerjaan sehingga bisa lebih produktif dan menambah pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang menjadi komponen utama Indeks Pembangunan Manusia terpenuhi sehingga angkanya akan meningkat.

Walaupun demikian, dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini diakibatkan oleh minimnya riset kelayakan dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga Belanja Modal yang dianggarkan tidak optimal, terdapat Belanja Modal yang telah terealisasi namun pengelolaannya kurang optimal, adanya anggaran belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah sekarang namun manfaatnya baru dapat dirasakan beberapa tahun ke depan, serta proporsi belanja modal yang lebih kecil dibanding dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (Pradnyantari dan Dwirandra, 2017).

Penelitian ini belum berhasil membuktikan penelitian yang dilakukan oleh Edi Yanto, dkk (2018); serta Sari dan Supadmi (2016) yang menerangkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Akan tetapi, hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sasti dan Latrini (2019), serta Pradnyantari dan Dwirandra (2017) dimana menemukan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil pengujian ini, meskipun Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah di Daratan Pulau Timor selama periode 2013-2018, dengan merujuk pada teori yang ada, besar harapan bahwa Belanja Modal yang dialokasikan sanggup untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan simpulan mengenai bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal pada indeks

pembangunan manusia di dataran Pulau Timor. Terdapat bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini terkait hasil olah data statistik Pemerintahan Daerah di Pulau Timor tahun 2013-2018 yang menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia dan belanja modal tidak berpengaruh pada IPM.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan kepada masyarakat tercapai dan berpengaruh pada IPM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah di Pulau Timor. Pemerintah daerah hendaknya dapat melakukan pengadaan aset daerah sebagai investasi yang mampu meningkatkan sarana dan prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan sektor publik, karena belanja modal memiliki peran penting terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Data Nasional 2018 Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. URL: <https://ntt.bps.go.id/indicator/26/46/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota.html>
- Bati. (2009). *Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Edi Yanto, Ridwan & Fattah, Vitayanti. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Survei Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah). *E-Jurnal Katalogis*. 6 (2). 125-135.
- Fadhly, Zul. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *E-Jurnal Universitas Negeri Padang*. 2976 – 2189.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- López, J. C., Ruiz, F. J., Feder, J., Barbero-Rubio, A., Suárez-Aguirre, J., Rodríguez, J. A., & Luciano, C. (2010). The Role Of Experiential Avoidance In The Performance On A High Cognitive Demand Task. *Journal Of Psychology And Psychological Therapy*, 10, 475–488.
- Pradana, M. (2018). Alokasi Belanja Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *E-Journal Unitomo*. 2(1), 1– 15.
- Pradnyantari, P.M dan A.A.N.B. Dwirandra. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Ipm Dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 19 (1). 536-564.
- Putri, I G.A.M. Asri Dwija. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 31 (2), 401- 413.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 15 (3). 2302.
- Sasti, I.A.T.P Dan M.Y. Latrini. (2019). Pengaruh Alokasi Belanja Operasi Dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 26 (2). 1632-1659. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.102.P29>
- Soejoto, A., Subroto, W. T., & Suyanto. (2015). Fiscal Decentralization Policy In Promoting Indonesia Human Development. *International Journal Of Economics And Financial*. 5 (3). 763–771.

Yanto, E., R., & Fattah, V. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Survei Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*. 6 (2), 125–135.